

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abu Daud Busroh, 2008, *Ilmu Negara* Jakarta: Bumi Aksara.
- Bagir Manan, 2013, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII PRESS.
- C.S.T Kansil dan Christine Kansil, 2005, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Fatwa, A. M, 2009. *Potret konstitusi pasca amandemen UUD 1945*. Penerbit Buku Kompas.
- Indra Rahmatullah, 2013, *Rajuvinasi Sistem Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Jakarta, DPR RI.
- Indrayana, D, 2007. *Amandemen UUD 1945: Antara mitos dan pembongkaran*. Mizan Pustaka.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*.
- Jimly Asshiddiqie, 1996, *Pergumulan dan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, Jakarta: UI Press.
- , 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia).
- , 2006, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*.
- , 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- , 2012, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisiu, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: PT Asdi Mahastya.

Montesquieu, 2007, *The Spirit of Laws, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, Bandung, Nusamedia.

Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.

-----, 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.

Patrialis Akbar, S. H, 2022. *Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI 1945*. Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Romi Librayanto, 2008, *Trias politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PUKAP, Makassar.

Sri Soemantri, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Sumali, 2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, UMM Press, Malang.

Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR tahun 1960 sampai dengan 2002.

C. Jurnal

- Abu Tamrin, 2015, "Perubahan konstitusi dan reformasi ketatanegaraan Indonesia", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.
- Affandi, H, 2016. Prospek Kewenangan MPR dalam Menetapkan Kembali Ketetapan MPR yang Bersifat Mengatur. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 39-50.
- Agustiwi, S. H., & MH, A, 2014. Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. *Rechstaat: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 163510.
- Ahirullah, Rajab, and Muhtar Said. 2023. "Urgensi *Checks and balances* Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Advanced In Social Humanities Research* 1.9, 1015-1031.
- Andi Sugirman, 2019, "Eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dalam Tata Hukum Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945", Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 3, No. 2.
- Asmara, G, 2015. Penguatan Kelembagaan MPR dalam Sistem Ketatanegaran Negara Republik Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1(3), 357-370.
- Beby, Mexsasai Indra Rescentia, and Junaidi Junaidi. 2016, *Prosedur Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Perubahan*. Diss. Riau University.
- Bustamin dan Jaya, R, 2019, 'Urgensi *Checks and balances* Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam', JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), Vol.18, No. 2, hlm. 225.
- Chandranegara, Ibnu Sina. 2016. "Penuangan *Checks and balances* kedalam Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13.3, 552-574.
- Christiani Junita Umboh, 2020, "Penerapan Konsep *Trias politica* dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia." *Lex Administratum* 8.1.
- Dewi, N. W. M. S, 2017. Kewenangan MPR sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat Pasca Amandemen Ke-4 UUD NRI 1945. *Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7(1), 1-11.
- Eko Riyadi, 2012, "Reposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Implikasinya terhadap Kedudukan TAP MPR/S Pasca Amandemen UUD 1945." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1.1.
- Evi Purnamawati, 2020, "Perjalanan Demokrasi Di Indonesia." *Solusi* 18.2.

- Gusman, D., & Nova, A, 2012. Kedudukan Ketetapan Mpr Berdasarkan Uu No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 437-447.
- Haryadi, D, 2018. Reformulasi Kewenangan Mpr Pasca Amandemen UUD NRI 1945. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 12(1), 2048-2055.
- Herlambang Perdana Wiratraman, 2007, "Hak-Hak konstitusional warga Negara setelah amandemen UUD 1945: konsep, pengaturan dan dinamika implementasi." *Jurnal Hukum Panta Rei* 1.1.
- Latif, A., & Chariansyah, H, 2023. Pengaturan Pelaksanaan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Perspektif Pembentukan Undang-Undang. *UNES Law Review*, 6(1), 2444-2455.
- Mahardika, A. G, 2019. Politik Hukum Hierarki Tap MPR Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 344-352.
- Ni Wayan Merda Surya Dewi, "Kewenangan MPR sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat Pasca Amandemen Ke-4 UUD NRI 1945." *Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora* 7.1, 2017.
- Nirahua, S. E, 2011. Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(4), 585-603.
- Odang Suparman, 2023, "Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori *Trias politica* Berdasarkan Prinsip *Checks and balances* System." *AHKAM* 2.1.
- Oktava, M. S, 2017. Eksistensi Ketetapan MPR/S Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal IuS Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(1), 119-142.
- Rahmatullah, 2013, 'Rejuvinasi Sistem *Checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia', *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2013.
- Rochmawanto, Munif. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan MPR Dalam Melakukan Perubahan Undang-Undang Dasar." *Jurnal Independent* 1.1, 2013: 29-43.
- Rohmah, E. I, 2019. Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, dan Perancis. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 13(1), 117-134.
- Rohmat, A. M, 2016. Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Era Reformasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 181-190.

- Rooza Meilia Anggraini, 2020, "Kedudukan Keteapan MPR Pasca Amandemen Konstitusi." *At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 1.02.
- Ruhenda, 2020, "Tinjauan *Trias politica* Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia." *Journal of Governance and Social Policy* 1.2.
- Santika, I. W. E., & Sujana, I. G, 2021. Mpr dalam sistem ketatanegaraan indonesia (studi komparatif antara sebelum dan sesudah perubahan uud 1945). *VYAVAHARA DUTA*, 16(1), 91-100.
- Saraswati, Retno. "Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Yustisia* 2.3, 2013: 97-103.
- Sati, N. I, 2020. Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 834-846.
- Setyawan, Yhannu. "Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 7.1, 2020: 150-164.
- Subanrio dan Arie Elcaputera, 2021, "Penataan Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 30, No.1, 2021, hlm. 69.
- Sunarto, 2016, "Prinsip Checks and balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 2, 2016.
- Trinanda, D., Yuliandri, Y., & Fahmi, K, 2022. Problematika TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Peluang Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 396-409.
- Tutik, T. T, 2013. Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 1-20.
- Valina Singka Subekti, 2008, *Menyusun Konstitusi Transisi. Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Warsito, Hasudungan Sinaga, 2022, "Kedudukan MPR sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945", *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 9 No. 2.

Widayati, 2015, ‘‘Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia’’,
Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No. 4, 2015.

-----, 2022 ‘‘Rekonstruksi Kelembagaan MPR’’, *Jurnal Pengembangan
Eistemologi Ilmu Hukum*, Prosiding Seminar Nasional.

Widayati, W., Absori, A., & Azhari, A. F, 2014. Rekonstruksi Kedudukan
Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Media
Hukum*, 21(2), 15.

